ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

Pengaruh *Leverage*, Opini Audit, APBD Terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Indonesia Bagian Tengah

Annisa Fitriana[1], Diska Arliena Hafni[2]
[1,2] Universitas Aisyiyah Yogyakarta
E-mail : anisafitriana106@gmail.com[1], diskaarliena@unisayogya.ac.id[2]

Article History:
Received: 26 Juni 2023
Revised: 07 Juli 2023
Accepted: 10 Juli 2023

Keywords: *Audit delay, Leverage, Audit Opinion, APBD*

Abstract: *The study aims at finding out the effect of leverage, audit opinion, local revenue, and expenditure budgets on audit delay in regencies/cities in Central Indonesia including Bali, NTB, and NTT. The study used audit reports on local government financial reports for Bali, NTB, and NTT provinces issued by the Indonesian Audit Board (BPK) for the 2020 and 2021 periods. Based on the purposive sampling method, the number of districts/cities used in the study is 41 districts/cities. The independent variables in the study are leverage, audit opinion, and regional revenue and expenditure budget (APBD), while the dependent variable is audit delay. The results of the study showed that the leverage and regional revenue and expenditure budget variables do not have a significant positive effect on audit delay, and the audit opinion variable has a significant negative effect on audit delay.*

PENDAHULUAN

Pengertian laporan keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2015). Laporan keuangan tersebut dapat digunakan publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Meskipun pada kenyataannya perhatian para pemakai laporan keuangan sering hanya ditujukan pada informasi laba, sehingga membuat para pemakai laporan keuangan utamanya investor tidak memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Hafni, 2012). Semakin pendek jangka waktu berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal publikasi laporan keuangan, maka semakin besar pula manfaat yang di peroleh para pengguna laporan keuangan. Begitu pula sebaliknya, untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh para pengguna laporan keuangan maka sudah seharusnya laporan harus di laporkan tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD secara tepat waktu.

Keterlambatan laporan keuangan dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak relevan. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa pengguna laporan keuangan adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

dan pemerintah. Maka dari itu pelaporan laporan keuangan yang tepat waktu dan berkelanjutan kepada DPRD dan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat umum juga menjadi sesuatu yang penting. Menurut Hafni (2013) manajemen yang berorientasi pada akuntansi keberlanjutan memberikan pengakuan akan pentingnya pengambilan keputusan manajemen dan akuntansi untuk keberlanjutan organisasi. Teori dalam ilmu manajemen dan akuntansi menyatakan bahwa ada sejumlah pengaturan keputusan akan keberlanjutan organisasi yang mana informasi akuntansi akan memberikan dukungan yang diperlukan sebagai dasar untuk menilai tindakan yang akan diambil oleh organisasi.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan siaran pers Badan pemeriksa keuangan (BPK) diketahui terjadinya beberapa kasus keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan daerah dari tahun 2015-2021. Adapun jumlah pemerintah daerah yang mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia

Tahun	Jumlah pemerintah daerah	Jumlah pemerintah daerah yang mengumpulkan tepat waktu	Pemda melebihi waktu yang ditentukan
2015	542	533	9
2016	542	537	5
2017	542	542	0
2018	542	542	0
2019	542	541	1
2020	542	541	1
2021	542	541	1

Sumber: bpk.go.id.

Data di atas menunjukan bahwa pada 7 tahun terakhir masih ada 17 keterlambatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam mengumpulkan LKPD. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi keterlambatan pemerintah daerah dalam menyampaikan LKPD nya sehingga menyebabkan peluang munculnya *audit delay* semakin besar. Adanya keterlambatan ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Rasio *leverage* merupakan rasio pengukuran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang Bakar & Arza (2019). Semakin tinggi rasio *leverage* pemerintah daerah maka artinya pemerintah tersebut kurang mampu dalam mengatasi utangnya. Pengukuran *leverage* pada penelitian ini menggunakan *debt to total asset ratio.*

Opini audit merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil audit laporan keuangan pada akhir periode tahunan, opini yang diberikan oleh auditor sangat berpengaruh dalam kesuksesan kinerja suatu pemerintah daerah Bakar & Arza (2019). Opini WTP yang diberikan oleh auditor kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa salah saji yang ditemukan auditor tidak banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyusun laporan keuangannya. Semakin singkat laporan keuangan disusun kemudian diberikan kepada BPK maka semakin kecil kemungkinan *audit delay.* Sedangkan opini selain WTP atau WTPDPP menyebabkan kemungkinan *audit delay* semakin meningkat karena menunjukkan banyaknya salah saji yang ditemukan oleh auditor.

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah dibutuhkan dana yang berkelanjutan (Fathah, 2017). Menurut Wibowo & Purwaningsih (2019) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rincian atas pendapatan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode akuntansi. Pemerintah daerah yang memiliki APBD yang besar tentunya mempunyai transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang mempunyai APBD yang lebih kecil. Banyaknya transaksi keuangan tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga adanya kemungkinan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada BPK, semakin lama pelaporan keuangan kepada BPK maka akan meningkatkan kemungkinan *audit delay.* Objek pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, NTB dan NTT. Indonesia bagian tengah terkenal dengan beragam wisata yang menarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, hal ini tentunya berdampak pada pendapatan daerah tersebut. Seiring dengan naiknya APBD pada Indonesia bagian tengah, tentunya akuntabilitas menjadi semakin penting. Menurut Fathah (2017) akuntabilitas yang baik merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan *good governance.* Lebih lanjut Hafni dan Harventy (2013) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara para *stakeholder* yang ada di dalam suatu organisasi. *Good governance* merupakan suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian suatu organisasi yang dapat membatasi pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset organisasi. Suatu proses yang tansparan atas penentuan tujuan organisasi, pencapaian berikut pengukuran kinerjanya.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) dan pihak penerima kewenangan (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas *principal* serta memberi wewenang bagi *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal.* Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan ini dapat terjadi pada berbagai organisasi termasuk organisasi pemerintah. Masyarakat umum adalah sebagai pemberi wewenang *(principal)* dimana pemerintah sebagai penerima wewenang *(agent)* yaitu yang di wakili oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Leverage terhadap Audit Delay

Leverage pada sektor publik merupakan penambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya serta dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat Priyastiwi & Saputra (2019). *Leverage* berhubungan dengan aktiva atau dana dimana pengguna aktiva tersebut adalah pemerintah daerah yang harus menutup biaya tetap atau beban tetap mereka. Rasio utang atau *leverage* ini menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukan tingkat kesehatan seta kemandirian finansial pemerintah daerah karena berkaitan dengan utang.

Semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor (Siregar, 2015). Semakin cepat pemerintah menyusun laporan keuangannya maka semakin cepat BPK dalam melakukan proses audit nya sehingga dapat meminimalisir *audit delay.* Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua diajukan sebagai berikut:

H1*: Leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay*

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

Opini Audit terhadap *Audit Delay*

Auditor memiliki tugas untuk melakukan audit dengan menilai kewajaran suatu informasi yang disajikan kepada publik terutama terkait dengan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit. Apabila suatu daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berarti tidak banyak salah saji yang ditemukan oleh auditor maka hal ini menunjukkan daerah tersebut telah menyusun laporan keuangan nya dengan baik, namun apabila suatu daerah dapat opini selain WTP yang artinya banyak ditemukan kesalahan saji pada laporan keuangan daerah tersebut maka proses audit akan lebih lama.

Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat mencerminkan bahwa daerah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintah yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola yang baik juga memiliki sistem penyusunan laporan keuangan yang baik tentunya membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam pelaporan laporan keuangan. Semakin singkat suatu daerah dalam pelaporan laporan keuangan mereka maka akan semakin cepat laporan keuangan akan di periksa oleh BPK maka akan meminimalisir *audit delay* yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua diajukan sebagai berikut:

H2: Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap *Audit Delay.*

Teori Keagenan menjelaskan hubungan tanggungjawab antara pemberi kewenangan dengan pihak penerima kewenangan yaitu pemerintah daerah sebagai penerima wewenang (*agent*) memiliki tanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan oleh *principal,* yaitu masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. APBD yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semakin besar APBD suatu Pemerintah Daerah maka tentunya dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang semakin lama karena pendapatan atau pengeluaran yang akan di periksa semakin banyak. Pemerintah Daerah yang memiliki APBD besar tentunya memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan Pemerintah Daerah yang memiliki APBD yang kecil.

Transaksi keuangan yang banyak memerlukan waktu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan daerah. Keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menyebabkan keterlambatan BPK dalam memeriksa laporan keuangan tersebut hal ini yang dapat menyebabkan *audit delay.* Dengan kata lain semakin besar total pendapatan yang dimiliki oleh pemerintahan akan mengurangi tingkat *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga diajukan sebagai berikut:

H3: Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berpengaruh positif terhadap *audit delay*

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sujarweni (2015) penelitian asosiatif adalah penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui adanya pengaruh antara variabel x yaitu *leverage,* opini audit, anggaran pendapatan dan belanja daerah

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

dengan variabel y yaitu *audit delay*.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang digunakan sebagai sifat atau ciri yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan nya. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel dan akan dirancang sebagai berikut:

Variabel *Dependen* (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang diharapkan timbul akibat variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *audit delay. Audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal akhir tahun anggaran hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh auditor. Pengukurannya dilakukan secara kuantitatif dari tanggal berakhirnya tahun buku pemerintah daerah (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh BPK Siregar (2015).

***Audit Delay* = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan**

Variabel *Independen* (X)

Variabel bebas diduga berpengaruh terhadap keberadaan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *leverage*, opini audit, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio pengukuran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang Bakar & Arza (2019). Semakin tinggi nilai persentase rasio *leverage*, maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dikarenakan utang yang dimiliki. Siregar (2015) *Leverage* diukur menggunakan *debt to total asset* yang dirumuskan sebagai berikut:

Debt to Total Asset = Total Utang/Total Asset

1) Opini Audit

Opini audit adalah pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen (BPK). Pada penelitian ini opini audit diukur dengan melihat jenis opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pengukuran opini audit dengan menggunakan variabel dummy. Daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf jelas (WTPDP) akan mendapatkan kode *binary* 1, sedangkan daerah yang mendapatkan selain opini selain wajar tanpa pengecualian dan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas akan mendapatkan kode *binary* 0 Bakar & Arza (2019).

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah yang Sah, kemudian Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, kemudian total Pembiayaan Daerah. Pada penelitian ini APBD dapat diukur

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

dari total pendapatan selama periode satu tahun Siregar (2015).

Teknik Analisis Data

Hubungan antara *audit delay* dengan variabel-variabel independen nya diukur dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan terlebih dahulu dilakukan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, kemudian uji hipotesis.

1) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dan korelasi antar variabel penelitian yaitu menunjukkan nilai maksimum, minimum, mean dan standar deviasi dari setiap variabel independen dan dependen yang dijabarkan dalam bentuk statistik Ghozali (2018), statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, *sum,* dan *range*.

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diteliti telah memenuhi kriteria asumsi klasik, sehingga dapat terhindar dari estimasi yang bias. Suatu model regresi dapat digunakan jika model tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik. Uji ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedesitas dan Uji Autokorelasi.

3) Analisis Regensi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel independen *Leverage* (X1), Opini Audit (X2), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (X3), terhadap variabel dependen yaitu *Audit Delay* (Y). Adapun persamaa regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

4) Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F atau *goodness of fit* digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel untuk memperkirakan nilai aktual. Secara statistik uji F dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila uji nilai statistik nya berada pada daerah kritis. Begitu juga sebaliknya, perhitungan statistik disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistik nya berada dalam daerah dimana Ho diterima Ghozali (2013).

Ketentukan menilai hasil hipotetis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1, dimana k merupakan jumlah varibel bebas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan kriteria:

a) Jika F*hitung* > F*tabel* atau P value < α = 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian adalah fit (bagus)
b) Jika F*hitung* < F*tabel* atau P value > α = 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak fit (tidak bagus).

b. Uji Koefisisen Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen Ghozali (2013). Nilai koefisiens determinasi adalah nol atau satu. Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu, maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

terbatas.

c. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali (2013). Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Cara pengambilan keputusan pengujian t adalah sebagai berikut:

a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau P value < 0,05, maka variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau P value < 0,05, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan tahun penelitian 2020 dan 2021. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu melihat dokumen yang sudah ada (Laporan Keuangan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur). Adapun proses seleksi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah kabupaten/kota yang diberikan opini auditor oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2020 dan 2021.	41
2.	Pemerintah kabupaten/kota yang laporan keuangannya mengungkapkan aset, utang, dan pendapatan daerah pada tahun 2020 dan 2021.	41
3.	Jumlah Kabupaten/kota yang menjadi sampel.	41
4.	Data yang diolah 41 x 2 tahun	82

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menggunakan teknik pemilihan sampel secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu, maka proses seleksi sampel yang diperoleh adalah 41 kabupaten/kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 dan 2021 yang dijadikan sampel.

Analisis Statistik Deskriptif

1) Karakteristik Variabel Kontinu

Hasil analisis deskriptif variabel kontinu yang terdiri dari *audit delay*, *leverage,* APBD menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Audit Delay	82	0,36	1,98	2,34	2,1493	0,07688
Leverage	82	0,1263	0,000	0,1263	0,00224	0,02037
APBD	82	2,45	10,14	12,59	0,03770	0,34143
Valid N	82					

Sumber: data diolah 2022

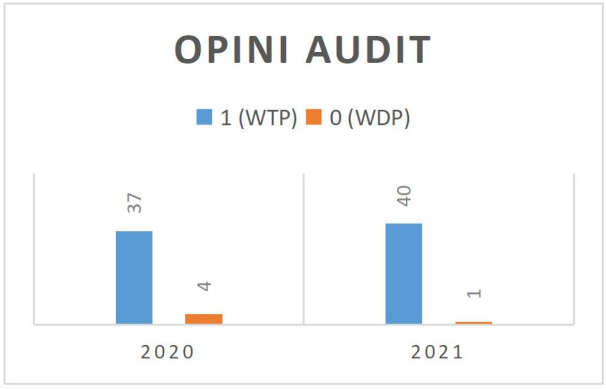
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *audit delay* pada tahun 2020 dan 2021 adalah antara 1,98 hingga 2.34 atau 96 hari hingga 218 hari dengan rata-rata *audit delay* 2.1493 dan standar deviasi sebesar 0,07688 dengan total 176,24. Tampak bahwa rata-rata *audit delay* pada pemerintah daerah di provinsi Bali, NTB dan NTT masih berada dibawah 180 hari tidak melebihi waktu yang diatur dalam perundang-undangan yaitu 180 hari (6 bulan). *Audit delay* tercepat yaitu 96 hari yang diperoleh Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021, adapun *audit delay* terlama diperoleh Kabupaten Kupang dengan 218 hari pada tahun 2020.

Leverage mempunyai rentang nilai antara 0,0000 hingga 0,1263 dengan rata-rata 0,015172 dan standar deviasi 0,0203708. Rata-rata *leverage* pada pemerintah daerah di Bali, NTB dan NTT yaitu 0,015172 yang berarti bahwa *leverage* cukup baik karna nilai *debt to total asset* nya kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah total aset yang lebih besar dari pada utangnya sehingga mampu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* terendah diperoleh oleh Kabupaten Sumba Tengah dengan nilai 0,0000 pada tahun 2020. Adapun *leverage* tertinggi diperoleh Kabupaten Gianyar dengan nilai 0,1263 pada tahun 2020.

APBD mempunyai nilai rata-rata 12,0151 dengan nilai terendah 10,14 dan nilai terendah 12,59 atau nilai APBD terendah Rp 13.778.957.369 dan nilai APBD tertinggi Rp 3.906.162.801.874 dan standar deviasi 0,34143. Nilai APBD terkecil diperoleh Kabupaten Bima pada tahun 2021 dengan nilai Rp 13.778.957.369 hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah tersebut masih kecil. Adapun nilai APBD yang terbesar diperoleh Kabupaten Badung dengan nilai Rp 3.906.162.801.874, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Badung memiliki pendapatan daerah yang besar.

2) Karakteristik Variabel Kategorikal

Analisis deskriptif variabel opini audit adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Grafik Opini Audit Tahun 2020&2021

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 37 kabupaten/kota yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 4 kabupaten/kota lainnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDF). Kemudian pada tahun 2021 ada 40 kabupaten/kota yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 1 kabupaten/kota lainnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan metode kolmogrov-smirnov dengan SPSS:

Tabel 4 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,240	Berdistribusi Normal

Sumber: data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,240 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas menggunakan metode Tolerance dan VIF dengan SPSS:

Tabel 5 Uji Multikolinearitas Tolerance dan VIF

Model	Tolerance	VIF
Leverage	0,907	1,102
Opini Audit	0,993	1,007
APBD	0,914	1,095

Sumber: data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* diatas 0,100 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dibawah 10,00 untuk setiap variabel. Nilai *tolerance* yang dihasilkan oleh variabel *leverage*, opini audit, dan APBD adalah

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

sebesar 0,907, 0,993, dan 0,914. Adapun nilai VIF untuk variabel *leverage*, opini audit, dan APBD adalah 1,102, 1,007, dan 1,095. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak terdapat problem multikolinearitas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

3) Uji Heteroskedesitas

Berikut adalah hasil uji heteroskedesitas menggunakan metode glejser dengan SPSS:

Tabel 6 Uji Heteroskedesitas Glejser

Model	Sig.
Leverage	0,080
Opini Audit	0,209
APBD	0,265

Sumber: data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas nilai signifikansi pada variabel *leverage*, opini audit dan APBD adalah 0,080, 0,209, dan 0,265. Nilai variabel independen berada diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedesitas pada data penelitian ini.

4) Uji Autokorelasi

Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan metode durbin watson dengan SPSS:

Tabel 7 Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model	Durbin Watson
1	2,224

Sumber: data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji autokolerasi pada nilai durbin watson adalah 2,224. Nilai durbin watson tersebut berada dalam rentang du = 1,7176 < d = 2,224 < 4-du = 2,2824. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam batasan autokolerasi dengan uji durbin watson maka data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari problem autokolerasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan model uji statistik t, uji koefisien determinasi.

a. Uji t

Berikut adalah hasil uji statistik t menggunakan SPSS:

Tabel 8 Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,216	0,273		8,118	0,000
Leverage	-0,416	0,381	-0,110	-1.092	0,278
Opini Audit	-0,162	0,031	-0,507	-5.249	0,000
APBD	0,008	0,023	0,034	0,335	0,738

Sumber: data diolah 2022

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

Berdasarkan tabel di atas, didapat dilihat nilai konstanta (α) sebesar 2,216 dan untuk *leverage* sebesar -0,416, sementara nilai opini audit sebesar -0,162, nilai APBD sebesar 0,008. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2{,}216 – 0{,}416X1 – 0{,}162X2 + 0{,}008X3.$$

Keterangan:

Y = *Audit Delay*
α = Konstanta
X1 = *Leverage*
X2 = Opini Audit
X3 = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

Konstanta memiliki nilai positif sebesar 2,216. Hal ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Ini berarti jika variabel independen *Leverage* (X1), Opini Audit (X2), Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (X3) dianggap sama dengan nol, maka variabel *Audit Delay* (Y) sebesar 2,216.

Koefisien *Leverage* (X1) = - 0,416. Hal tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel *leverage* dengan *audit delay*. Ini berarti jika nilai variabel *leverage* (X1) mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel *audit delay* akan mengalami penurunan sebesar 0,416.

Koefisien Opini Audit (X2) = -0,162. Ini berarti bahwa rata-rata lamanya *audit delay* pada kabupaten/kota di provinsi Bali, NTB, NTT selama tahun 2020 dan 2021 yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan yang mendapatkan opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah 0,162. Dimana kabupaten/kota yang mendapatkan opini audit (WTP) akan mengurangi tenggang waktu *audit delay* sebesar 0,162.

Koefisien APBD (X3) = 0,008. Ini berarti bahwa rata-rata lamanya *audit delay* pada kabupaten/kota di provinsi Bali, NTB, NTT selama tahun 2020 dan 2021 yang memiliki APBD yang lebih besar dengan kabupaten/kota yang memiliki APBD yang lebih kecil adalah sebesar 0,008. Dimana kabupaten/kota yang memiliki APBD yang lebih besar akan mengurangi tenggang waktu *audit delay* sebesar 0,008.

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki regresi negatif sebesar -0,416 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,278 dengan nilai thitung -1.092. Nilai ttabel adalah 1,991 > -1,092 dan nilai signifikansi sebesar 0,278 > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa *leverage* yang diukur dengan *debt to asset ratio* (DAR) tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap *audit delay*.

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki regresi negatif sebesar -0,162 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai thitung -5,249. Nilai ttabel adalah sebesar 1,991 > -5,249 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *audit delay.*

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel APBD memiliki regresi negatif sebesar 0,008 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,738 dengan nilai thitung sebesar 0,335. Nilai ttabel adalah sebesar 1,991 > 0,335 dan nilai signifikansi sebesar 0,738 > 0,05 yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa APBD tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap *audit delay*.

b. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi menggunakan SPSS:

Tabel 8 Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R.Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,527	0,227	0,250	0,6660

Sumber: data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai Adjusted R Square pada penelitian ini adalah sebesar 0,250. Hal ini menunjukkan bahwa *audit delay* yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, NTB, dan NTT pada tahun 2020 dan 2021 dapat dijelaskan oleh variabel independen *leverage*, opini audit, dan APBD sebesar 25% sedangkan 75% dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

1) Pengaruh *Leverage* Terhadap *Audit Delay*

Hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini menyebutkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay.* Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan diperoleh regresi negatif sebesar -0,416 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,278. Hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t tabel adalah 1,991 > -1,092 dan nilai signifikansi sebesar 0,278 > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *debt to total asset ratio* sebagai ukuran *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap *audit delay. Debt to total asset ratio* menggambarkan tingkat kesehatan keuangan pada suatu pemerintah daerah. Pada penelitian ini kesehatan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi lamanya *audit delay*, hal ini diduga karena rendahnya tingkat *debt to total asset ratio* pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, NTB, dan NTT terbilang kecil jika dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya, sehingga besar atau kecilnya tingkat utang tidak menjadi alasan untuk pemerintah daerah untuk tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2) Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini menyebutkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang telah dilakukan, diperoleh hasil regresi negatif sebesar -0,162 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t tabel adalah sebesar 1,991 > -5,249 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh oleh pemerintah daerah maka akan memperkecil kemungkinan adanya *audit delay*. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil, hal ini juga menggambarkan bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik, pemerintah daerah akan lebih cepat dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangannya kepada BPK, semakin cepat pelaporan keuangan maka semakin cepat BPK dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, hal ini akan meminimalisir waktu *audit delay*.

3) Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada *Audit Delay*

Hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Hasil uji t tabel adalah sebesar 1,991 > 0,335 dan nilai signifikansi sebesar 0,738 > 0,05 yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebagai ukuran APBD tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Pendapatan daerah yang besar menunjukkan pemerintah daerah yang mampu mengelola daerahnya dengan baik. Pemerintah daerah yang memiliki APBD yang besar tentunya memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak namun hal ini tidak bisa menjadi tolak ukur terjadi atau tidak terjadinya *audit delay.* Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, sektor publik berorientasi pada akuntabilitas maka dari itu pemerintah daerah harus segera melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga walaupun pendapatan daerah pada sektor publik besar tidak mempengaruhi lamanya waktu audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

1) *Leverage* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay* pada kabupaten/kota di Indonesia bagian tengah. Hal ini dibuktikan dengan nilai pada uji t yang menunjukkan bahwa nilai t tabel adalah 1,991 > -5 -1,092 dan nilai signifikansi sebesar 0,278 > 0,05 maka H_1 ditolak.
2) Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* pada kabupaten/kota di Indonesia bagian tengah. Hal ini dibuktikan dengan nilai pada uji t, nilai t tabel adalah sebesar 1,991 > -5,249 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti H_1 diterima.
3) APBD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay* pada kabupaten/kota di Indonesia bagian tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t, nilai t tabel adalah sebesar 1,991 > 0,335 dan nilai signifikansi sebesar 0,738 > 0,05 yang berarti H_3 ditolak.

DAFTAR REFERENSI

Bakar, Maidelfian Putra., & Arza, Fefri Indra., (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Leverage Terhadap Audit Delay. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1168–1183. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.134

Fathah, Rigel Nurul. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*. *2*(2), 1–21.

Hafni, Diska Arliena & Harventy, Gina. (2013). Membingkai Good Corporate Governance Amal Usaha Muhammadiyah dalam Kerangka Amanah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 14 (2), 85-95.

Hafni, Diska Arliena. (2013). Analisis Wacana Kritis: Menguak Moralitasdan Profesionalisme Bisnis dalam PraktikAkuntansi Pertanggungjawaban Sosial. Jurnal Reviu Akuntansidan Keuangan, 3 (2), 465-478.

IAI. (2015). Psak 1. *Ikatan Akuntansi Indonesia*, *01*(01), 1–79.

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-1.pdf

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafni, Diska Arliena. (2012). Praktik Earning Management Dalam Perspektif Etika Syari'ah. Ekonomika-Bisnis, 3 (2), 99-110.

Priyastiwi., & Saputra, Nunung. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Karakteristik Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, *6*(2), 157–172.

Siregar, Baldric. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(2), 89. https://doi.org/10.21460/jrak.2015.112.10

V.Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*.

Wibowo, Fajar. Hendro., & Purwaningsih, Endang. (2019). Pengaruh Nilai Apbd, Total Aset, Opini Audit, Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Audit Delay Pemerintah Daerah Di Subosukowonosraten. *Media Akuntansi*, *93*(1), 11–20.